

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit macet atau *Non Performing Loan* merupakan suatu masalah serius dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan tingginya kredit macet pada suatu bank jelas akan mempengaruhi asset aktiva dari bank tersebut, karena dengan semakin besarnya volume kredit yang bermasalah atau *default* akibat gagalnya debitur untuk membayar kewajiban kreditnya jelas akan mengurangi dan menghambat sirkulasi aliran dana bank disamping berkurangnya likuiditas bank. Akibatnya, dengan rendahnya tingkat likuiditas pada bank akan berdampak pada ketidakmampuan bank dalam menutupi biaya operasional atas tanggungan terhadap suku bunga DPK (Dana Pihak Ketiga). Ketidakmampuan bank dalam membayar kewajibannya kepada DPK akan menurunkan kepercayaan DPK terhadap bank, yang nantinya jelas akan berdampak pada penurunan kinerja bank. Jika bank mengalami kinerja buruk tidak menutup kemungkinan bank yang bermasalah tersebut akan dilikuidasi, dimerger, dibekukan operasinya (BBO), dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) dan diikut sertakan dalam program rekapitalisasi. Ketika keadaan tersebut terjadi maka masalah yang menimpa Indonesia pada krisis 1998 akan terulang kembali. Masyarakat yang menggantungkan penyaluran kredit untuk keperluan investasi, modal kerja dan keperluan konsumsi akan kesulitan dalam memperoleh modal yang nantinya akan berimbas pada penurunan jumlah output masyarakat.

Umumnya tinggi-rendahnya kredit macet pada dana yang disalurkan bank akan menjadi tolak ukur bagi bank bersangkutan untuk mengkategorikan tingkat kesehatan bank jika dilihat dari kualitas asset yang disalurkan. Dari beberapa referensi yang ada, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah. Secara garis besar terdapat tiga faktor umum yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada sektor perbankan yaitu faktor *intern* debitur, faktor *intern* bank dan faktor *ekstern* non bank dan debitur (Subagio, 2005). Dilihat dari faktor *intern* debitur faktor penyebab kredit macet adalah faktor usia (Mohd Zeini Abd Karim dkk, 2010) dan karakter baik atau buruk (Jaharuddin, 2008), kemunduran usaha debitur, mismanajemen (Rita Rosmilia, 2009).

Dari sisi faktor *intern* bank terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada perbankan yaitu *Loan Deposit Ratio* (besarnya kuantitas kredit yang disalurkan), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), *Capital Adequacy Ratio* (rasio tingkat kecukupan modal), tingkat bunga pinjaman (Subagio, 2005), penilaian anggunan, lokasi, petugas bank, besaran kredit (Agustinus, 2007). Sedangkan kredit macet yang disebabkan oleh faktor *ekstern* non bank dan debitur adalah inflasi, kurs (Subagio, 2005), GDP per kapita riil (Irum Saba, 2012), bencana alam, tingkat PDB (Padmantlyo, 2011), penurunan kondisi moneter negara, prospek dan kinerja usaha, peraturan pemerintah, peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional serta manajemen usaha nasabah dan bencana alam (Sutojo, 2000).

Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, yaitu adanya gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 Skala Richter (SR). Dimana peristiwa tersebut selain menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan atau infrastruktur, dan kegiatan usaha masyarakat baik produksi maupun distribusi. Gempa bumi tektonik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut juga menimbulkan masalah baru bagi dunia perbankan, yaitu tingginya kredit macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur yang mengambil kredit perbankan di kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat pada bank umum baik konvensional maupun syariah kredit macetnya meningkat dari 119 miliar rupiah pada kuartal II menjadi 166 miliar rupiah pada kuartal III di tahun 2006 atau naik sebesar 39,5 persen, sementara pada BPR naik 2 miliar rupiah dari 17 miliar rupiah pada kuartal II menjadi 19 miliar rupiah pada kuartal III (Kajian Ekonomi Regional DIY, 2006).

Tingginya kredit macet yang terjadi di DIY pasca gempa menyebabkan permasalahan baru khususnya bagi perbankan dan juga bagi debitur yang mengalami gagal bayar. Bagi dunia perbankan adanya kredit *default* yang belum teratasi ini jelas akan berdampak bagi guncangan permodalan yang menimbulkan efek ganda bagi penyaluran kredit. Tertahannya modal bank disebabkan oleh adanya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) bank yang tinggi untuk menjaga aset likuidnya yang dapat sewaktu-waktu diambil oleh nasabah deposan, sehingga keadaan ini dapat membuat penyaluran kredit menjadi agak tersendat. Dari data yang diperoleh, pada kuartal II dan kuartal III tahun 2006, rasio *Loan Deposit Ratio* (LDR) Bank Umum di DIY mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan rasio sebelum terjadinya gempa, dimana pada kuartal II rasio LDR Bank Umum mengalami penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 48,79 persen jika dibandingkan dengan kuartal I yang sebesar 51,08 persen. Sementara itu, untuk kuartal III rasio LDR Bank Umum di DIY naik menjadi 50,68 persen. Walaupun terjadi kenaikan sebesar 0,03 persen pada kuartal III, namun jika dibandingkan dengan rasio LDR pada kuartal I jelas rasio tersebut masih rendah. Artinya dengan adanya gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 ini, jelas sangat berdampak bagi penurunan kegiatan intermediasi bank. Umumnya sebagian besar penyaluran kredit yang disalurkan oleh Bank Umum di DIY berupa kredit konsumsi yang ditunjukkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut data Kajian Ekonomi Regional DIY (2006), kredit konsumsi Bank Umum pada kuartal II tahun 2006 berjumlah 3.203 miliar atau naik 0,003 persen jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2006 yang hanya sebesar 3.192 miliar dan pada kuartal III tahun 2006 kembali naik sebesar 0,03 persen menjadi 3.310 miliar. Adanya kenaikan pada kredit konsumsi untuk tujuan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari banyaknya bangunan di DIY yang rusak akibat gempa.

Sementara itu untuk Bank Perkreditan Rakyat, terjadinya gempa pada awal Juni justru meningkatkan rasio LDR BPR pada kuartal II 2006 dengan kenaikan sebesar 1,6 persen dan sebaliknya mengalami penurunan di kuartal III dan IV dengan masing-masing penurunan sebesar 2,07 persen dan 6,72 persen. Kenaikan yang terjadi pada rasio LDR pada kuartal II tersebut terjadi akibat adanya penurunan pada Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, yaitu sebesar 0,40 persen

dari kuartal sebelumnya dan terjadinya peningkatan pada jumlah kredit yang disalurkan sebesar 1,31 persen dari kuartal sebelumnya. Dan sebaliknya, terjadinya penurunan rasio LDR pada kuartal III dan IV akibat adanya kenaikan yang lebih besar pada sisi penghimpunan dana jika dibandingkan dengan kredit yang disalurkan. Dimana pada periode tersebut tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 4,61 persen dan 6,48 persen, sementara pada porsi penyaluran kredit BPR hanya mampu menyalurkan dananya sebesar 867 miliar (naik 2,36 persen) pada kuartal III dan 861 miliar (turun 0,69 persen) pada kuartal IV tahun 2006. Umumnya rata-rata kredit yang disalurkan oleh BPR cenderung dipergunakan untuk tujuan konsumsi.

Untuk menanggulangi masalah kredit macet di DIY pasca terjadinya gempa bumi tersebut, segala upaya telah dilakukan baik oleh Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR maupun oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 untuk diadakannya pemutihan kredit macet di bank-bank yang beroperasi di wilayah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun fakta yang terjadi sampai dengan dikeluarkannya peraturan tersebut masih banyak kredit macet pasca gempa yang belum diputihkan dan masih tergolong besar. Umumnya kredit macet tersebut paling besar terjadi pada beberapa bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

Tabel.1.1.

Data Rekapitulasi Sisa Kredit UMKM Korban Gempa Se-DIY per 2009 dari Sejumlah Bank Negara dan Daerah

No.	Nama Bank	Jumlah Debitur (orang)	Jumlah Kredit Macet (miliar)	Persentase Jumlah Kredit Macet UMKM (%)
1	BTN	4	1,1	7,91

Lanjutan Tabel 1.1.

2	BPD DIY	46	0,488	3,51
3	Bank Mandiri	120	6,02	43,28
4	BRI	555	6,3	45,30

Sumber: www.antarnews.com diolah, 2013.

Menurut ANTAR NEWS (2013), sesuai data rekapitulasi sisa kredit para UMKM korban gempa se-DIY per 2009 dari sejumlah bank negara seperti BTN ada empat debitur dengan nilai sebesar Rp 1,1 miliar, kemudian Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 488 juta dengan 46 debitur. Kemudian Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp 6,02 miliar dari sebanyak 120 debitur, serta kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 6,3 miliar dengan sebanyak 555 debitur. Dari beberapa Bank Umum tersebut terlihat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki porsi kredit macet terbesar yang lamban dalam penanganannya yaitu mencapai 45,30 persen, hal ini tidak terlepas dari proyeksi penyaluran kredit yang lebih mengacu pada sektor usaha kecil dan UMKM. Tersendatnya pembebasan kredit macet ini akan membebankan debitur yang mengalami kredit default. Menurut Hakim dalam Antar News (2013), kurang lebih 1.000 UMKM belum mengalami pembebasan kredit. Artinya dengan masih banyaknya kredit macet oleh UMKM yang belum dibebaskan ini jelas akan berdampak bagi perkembangan usaha UMKM, sehingga dapat berimplikasi pada tersendatnya penyerapan tenaga kerja di DIY.

Dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Analisis Tingkat Kredit Macet di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Terjadinya Gempa Bumi Tektonik 27 Mei 2006 dan Dampak

PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tanggal 7 Juni 2006 terhadap Penanganan Kredit Macet Pasca Terjadinya Gempa Bumi”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat kredit macet Perbankan sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006?
2. Bagaimana dampak PBI No. 8/10/PBI/2006 terhadap penyelesaian kredit macet Perbankan setelah terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan analisis tingkat kredit macet di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 dan Dampak PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tanggal 7 Juni 2006 terhadap Penanganan Kredit Macet Pasca Terjadinya Gempa Bumi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kredit macet Perbankan sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006.
2. Untuk mengetahui dampak PBI No. 8/10/PBI/2006 terhadap penyelesaian kredit macet Perbankan setelah terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kajian penelitian ini di masa yang akan datang khususnya bagi Bank Umum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris dan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai tingkat kredit macet di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 .
2. Memberikan penjelasan yang relevan dan memadai kepada setiap pengambil kebijakan, baik dari pihak pemerintah (OJK) dalam hal ini selaku pemegang kekuasaan dalam bidang ekonomi dan moneter khususnya dalam tugas dan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas bank yang kini telah dilimpahkan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun untuk pihak perbankan akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam hal penyaluran kredit.
3. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan dunia praktisi untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya dalam rangka mendapatkan penemuan-penemuan baru yang membahas tentang analisis tingkat kredit macet di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca terjadinya gempa bumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 dan dampak PBI Nomor 8/10/PBI/2006 Tanggal 7 Juni 2006 terhadap Penanganan Kredit Macet Pasca Terjadinya Gempa Bumi.